

RUANG TANPA BATAS: SEJARAH DAN POLITIK MEMORI PADA PUBLIC SPACE MONUMEN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Nanang Setiawan

Mahasiswa Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
nanang.fans45@gmail.com

Abstrak

Berangkat dari peristiwa perang kemerdekaan yang disampaikan melalui pesan utama bahwa segala bentuk perjuangan demi bangsa dan negara layak untuk dikenang generasi penerus, ternyata mampu menyimpan berbagai ingatan serta menempatkan Soeharto di mata masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Orde Baru benar-benar masuk di dalamnya sebagai sebuah sosok sentral yang berusaha mengkonstruksi ingatan melalui penggunaan simbol-simbol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Melalui public space khususnya monumen, simbol dan wacana direpresentasikan untuk menunjukkan sebuah identitas agar mengendap dalam ingatan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa konstruksi sejarah melalui sebuah monumen yang mengandung pengalaman masa lalu merupakan sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. Lebih dari itu, monumen telah dijadikan sebagai perantara guna menyatukan persepsi atau konstruksi makna atas sebuah peristiwa sejarah untuk kepentingan masa kini yang mengarah pada monopoli penguasa. Konstruksi sejarah di dalamnya kemudian menjadi penting karena terdapat kepercayaan bahwa siapa yang menguasai sejarah maka akan menguasai masa depan. Nampaknya inilah yang dilakukan Orde Baru di bawah Soeharto melalui monumen bernama Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949.

Kata Kunci: Memori, Monumen, dan Soeharto

Abstract

Departing from the war of independence, which was conveyed through the main message that all forms of struggle for the nation and state deserve to be remembered by the next generation, it turned out to be able to save various memories and place Suharto in the eyes of the Indonesian people. In this regard, the New Order really entered into it as a central figure who tried to construct memories through the use of certain symbols in people's lives. Through public space, especially monuments, symbols and discourses are represented to show an identity so that it settles in people's memories. Thus, it can be seen that the construction of history through a monument containing past experiences is unavoidable. More than that, the monument has been used as an intermediary to unite the perception or construction of meaning on a historical event for the benefit of the present that leads to the monopoly of the ruler. The construction of history in it then becomes important because there is a belief that whoever controls history will control the future. It seems that this is what the New Order did under Suharto through a monument called the General Attack Monument on March 1, 1949.

Keywords: Memory, Monument, and Suharto.

PENDAHULUAN

Berawal dari peristiwa vandalisme yang terjadi Jumat 15 Februari 2019, pada 25 relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kompleks Museum Benteng Vredeburg, telah memberi ide penulis untuk membongkar sejarah dan politik memori penguasa dalam tempat umum (*public space*) di Yogyakarta.¹ Ide tersebut mengarahkan pada bagaimana caranya masa lalu (sejarah) dapat digunakan untuk kepentingan masa kini. Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan mengenai sejarah dan politik memori rezim Orde Baru dalam *public space* yang mampu menyimpan berbagai ingatan dan menempatkan Suharto di mata masyarakat Indonesia. Ingatan atas sosok jenderal besar dengan kesempurnaannya sebagai seorang patriot, pembela kebenaran, penegak ideologi bangsa, lelaki yang sederhana, seorang ayah sejati bagi segenap rakyat Indonesia dan lain sebagainya (Budiawan, 2013: Xvii).²

Berangkat dari pemaparan singkat diatas, muncul indikasi penguasaan atas sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tidak dapat dipungkiri konstruksi sejarah coba dibangun dalam berbagai sendi kehidupan baik mulai dari sejarah sosial, budaya, dan politik. Orde Baru benar-benar masuk di dalamnya, sebagai sebuah sosok sentral yang berusaha mengkonstruksi ingatan (*memory*) yang dilakukan melalui penggunaan simbol-simbol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Melalui *public space* simbol dan juga wacana yang direpresentasikan tak lain untuk menunjukkan sebuah identitas agar lebih dikenal dan mengendap dalam ingatan masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan suatu ingatan yang diabadikan melalui berbagai wujudnya untuk mengukuhkan identitas penguasa yang termanifestasi dalam bentuk material. Wujud material inilah yang paling mudah dilihat dan kemudian dipahami maknanya, misalnya saja sebuah memori muncul pada bangunan seperti monumen-monumen di mana sebagai kehendak untuk mengingat sekaligus kehendak untuk merawat ingatan. Oleh karena itu, hal ini sangat berkaitan dengan simbol dan fungsinya sebagai representasi konkret dari suatu memori kolektif yang

¹Lihat lampiran I.

²Contoh bagaimana sifat dan fungsi politik memory dan ingatan bisa dikonstruksi.

dikonstruksi atau diarahkan. Itulah sebabnya institusi yang merasa berwenang atas “*sites of memory*” senantiasa menjaga narasi sejarah yang diupayakan dan agar orang lain tidak membuka kemungkinan yang lain (Budiawan, 2013: xii-xiii). Konsep ini yang kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan relasi kekuasaan dalam *publik space* yaitu bangunan monumen (*tetenger*).³

Atas dasar inilah, penelitian ini akan mencoba mengulik relasi kekuasaan yang tersimpan dalam sebuah bangunan monumen (Miriam Budiarjo, 1997: 35).⁴ Monumen ini menjadi menarik dan unik dibahas, karena mencoba melihat peran dan makna monumen dalam konteks sosial-politik secara historis termasuk analisis kehadirannya pada periode Orde Baru. Bahkan konstruksi sejarah di dalamnya menjadi penting karena terdapat kepercayaan bahwa siapa yang menguasai sejarah, maka akan menguasai masa depan (Bambang Purwanto, dalam, Aswi Warman Adam, 2015: 3-4). Nampaknya inilah yang dilakukan Soeharto melalui monumen, bernama Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 (SO 1 Maret 1949). Peristiwa yang tak lain merupakan puncak dari perang kemerdekaan yang disampaikan melalui strategi yang baik dengan pesan utama bahwa segala bentuk perjuangan demi bangsa dan negara layak untuk diabadikan, dikenang, dan kemudian dijadikan sebuah pelajaran untuk generasi penerus, meski perjuangan yang ditampilkan adalah sebuah perjuangan yang berbasis militerisme.

Pengetahuan di Monumen SO 1 Maret 1949 yang bersifat monopoli dan sentralistik inilah yang kemudian harus dicurigai dan dipertanyakan ulang kemurnian atau kebenarannya, karena pengetahuan ini sudah menjadi mapan dan jauh dari jangkauan kritik. Hal ini juga kemudian memunculkan pertanyaan, apakah tema yang ditampilkan beserta bentuk yang dibuat dalam Monumen SO 1 Maret 1949 tersebut dibuat tanpa alasan? Tentunya bukan tidak mungkin tema, bentuk, dan narasi sejarah yang ada menyimpan memori, nilai, makna, dan maksud-maksud tertentu yang sengaja diarahkan sesuai dengan kepentingan.

³Masyarakat Jawa memaknai monumen sebagai *tetenger* yang berarti penanda atau pengingat.

⁴Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan kegiatan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Lebih lanjut dari uraian diatas, penelitian ini tidak secara langsung bersangkutan dengan periode sejarah yang jauh, tetapi mencoba memperjelas relasi kekuasaan dalam narasi sejarah yang dibangun pada Monumen SO 1 Maret 1949. Pendapat ini kemudian menjadi acuan ketika mencermati sejarah dan memori di rezim Orde Baru, Militer dan sosok Suharto dalam *public space*. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mengetahui latar belakang mengapa Monumen SO 1 Maret 1949 perlu dibangun; (2) Bagaimana realitas politik memori di dalam Monumen SO 1 Maret 1949; dan (3) Bagaimana upaya konstruksi sejarah di Monumen SO 1 Maret 1949 yang diupayakan untuk melegitimasi kekuasaan Suharto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis melalui empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak masa lalu atau sumber sejarah yang berkaitan dengan tema sejarah politik memori pada *public space* Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Kritik sumber, yaitu menguji dan menganalisa secara kritis berbagai sumber yang diperoleh untuk menentukan keotentikan sumber. Interpretasi, yaitu usaha menggabungkan makna tentang hubungan fakta-fakta yang diperoleh agar saling berkaitan dan memiliki makna yang bersifat logis. Kemudian historiografi, merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan fakta ke dalam bentuk tulisan sejarah sebagai hasil penelitian (Kuntowijoyo, 2013: 73-83).

TIMJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN

Harus diakui, *public space* Monumen SO 1 Maret 1949 yang berada di titik 0 Km Kota Yogyakarta masih luput dari perhatian para sejarawan. Hal tersebut dimungkinkan, karena agak sulit menemukan karya-karya yang secara khusus membahasnya. Namun begitu, studi pustaka tetap dilakukan yang dimaksudkan untuk mencari pembeda dari penelitian-penelitian yang masih dalam satu tema yang sama. Di bawah ini sejumlah karya yang menyinggung dari fokus penelitian tentang

“Ruang Tanpa Batas: Sejarah dan Politik Memori Pada *Public Space* Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949” dalam sudut pandang yang berbeda-beda.

Karya pertama buku yang disunting Antakusumah dengan judul *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Buku ini berisi kumpulan tulisan para kolega Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disusun dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-70. Di dalam karya ini terdapat bab berjudul peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sepanjang 16 halaman, yang kemudian juga dijadikan sebagai rujukan untuk melihat dinamika politik peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi (Antakusumah, 2011). Karya ini juga sekaligus dijadikan sebagai usaha awal untuk meronstruksi peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi bagian dalam kajian ini. Dengan demikian karya ini dapat digunakan untuk menjelaskan dari versi lain di luar versi Orde Baru, serta menjadi kesempatan bagi penelitian ini untuk menelusuri lebih jauh sejarah dan politik memori di dalam Monumen SO 1 Maret 1949.

Masih berkaitan dengan kontroversi, buku selanjutnya yang menjadi rujukan ditulis oleh Tim Lembaga Analisa Informasi yang berjudul *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949* yang menyinggung mengenai pengendalian sejarah. Walaupun penelitiannya fokus pada berbagai peristiwa tahun 1949, namun dalam salah satu sub babnya menyinggung mengenai *framing* yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Tindakan tersebut untuk mempertanyakan peran Suharto yang selalu digembar-gemborkan. Bahkan, dibuat propaganda untuk meyakinkan masyarakat bahwa Soeharto adalah sosok pemberani yang jenius dan berandil mutlak dalam peristiwa tersebut. Mulai dari buku-buku sejarah, buku-buku sekolah, hingga film berjudul *Janur Kuning* yang disutradarai Rengga Surawidjaja. Semuanya menempatkan Soeharto sebagai tokoh sentral yang melebihi Jendral Soedirman dan Sultan Hamengku Buwana IX (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2000). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat celah untuk diteliti dari karya ini yang belum menyinggung mengenai *public space* yang berwujud material.

Buku yang relevan selanjutnya ditulis oleh Kathrine E. McGregor dengan judul *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusur Sejarah Indonesia*. Buku ini menggunakan konsep representasi untuk menekankan pengaruh masa kini dalam menyajikan kembali masa lalu. Berkaitan dengan konsep yang digunakan memberikan perhatian pada siapa yang melakukan representasi. Dari sini buku ini mengungkapkan kisah-kisah di balik proyek Orde Baru dalam berbagai media seperti museum, film, monumen dan lain sebagainya (McGregor, Katherine E, 2008). Terkait dengan media buku karya P. Suryo Haryono, Muchtaruddin Ibrahim, BA., dan Darto Harmoko yang berjudul *Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta* juga dirujuk dalam penelitian ini. Fokus dari penelitian buku ini memuat monumen-monumen perjuangan yang berada di empat kabupaten ditambah satu kotamadya (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kotamadya Yogyakarta). Studi ini juga mengungkap tentang latar belakang dan pendirian Monumen SO 1 Maret 1949. Akan tetapi, karena pembahasannya mencakup 18 monumen yang berada di Provinsi DIY, pada akhirnya karya ini tidak menyentuh secara luas dan mendetail tentang Monumen SO 1 Maret 1949 (P. Suryo Haryono, dkk, 1987). Oleh sebab itu karya ini memberi celah untuk lebih lanjut diteliti.

Selain karya-karya yang menyinggung peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, penelitian ini juga membutuhkan literatur tentang sejarah dan memori. Buku yang dianggap penting dan dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini, yaitu buku yang disunting oleh Budiawan yang berjudul *Sejarah Memori: Titik Simping dan Titik Temu*. Berlatar belakang dari kumpulan sepuluh esai yang dihimpun oleh Budiawan, di dalam bukunya berusaha menunjukkan hubungan problematis antara sejarah dan memori yang dapat dikatakan sebagai hal baru dengan berbagai isu atau topik menarik (Budiawan, 2013: xii-xiii). Buku ini dirasa relevan, karena memuat pemahaman politik memori yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Dari kajian historis di atas, dapat diketahui bahwa tema tentang *public space* yang relasinya dengan sejarah dan politik memori belum terungkap dengan jelas. Oleh karena itu, karya ini akan melengkapinya dengan fokus penelitian pada

hubungan sejarah dan politik memori kekuasaan Orde Baru pada *public space* yaitu Monumen SO 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebagai *Tetenger* Sejarah

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda secara tiba-tiba melakukan serangan melalui Lapangan Udara Maguwo yang pada akhirnya dapat menguasai Yogyakarta. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda ke-II, sekaligus pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Lingarjati atas pengakuan keberadaan Negara Indonesia (Himawan Soetanto, 2006: 111). Namun serangan ini mampu dibalas oleh bangsa Indonesia melalui kerja sama rakyat dengan pasukan bersenjata resmi (TNI), atau yang sering dikenal sebagai Perang Rakyat Semesta. Perlawanan total rakyat Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 1 Maret 1949, dimana tepat pada pukul 06.00 saat sirene berbunyi pasukan yang tergabung dalam Wehrkercise III melakukan serangan serentak dari berbagai penjuru ke dalam Kota Yogyakarta yang ketika itu masih menjadi Ibukota Indonesia.

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tersebut menjadi sangat penting bagi perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di forum Internasional untuk mendesak Belanda. Akhirnya Indonesia dapat mendesak Belanda turun ke meja perundingan yang kita kenal dengan Konferensi Meja Bundar sekaligus menjadi akhir sengketa antara Indonesia dengan Belanda (Nugroho Notosusanto, 1948: 54; Tim Lembaga Analisis, 2000: 33-34). Perundingan ini memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang sebelumnya juga diikuti dengan perjanjian Roem-Royen yang didalamnya memutuskan untuk menarik mundur pasukan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949 (Suwarno, 1994: 252.; A.H. Nasution, 1977: 591). Memasuki posisi Belanda yang tidak dapat dipertahankan, akhirnya kemudian secara resmi telah menyerahkan kedaulatan dari Federasi Negara Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Pentingnya perlawanan yang dilakukan pada dekade 1948-1949 tentunya menjadi tonggak baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini sebagai penanda bahwa peristiwa tersebut adalah momen penting yang layak diingat dan dicatat

dalam historiografi Indonesia. Sehingga peristiwa bersejarah dengan berbagai pahlawan yang terlibat langsung dalam peristiwa itu pantas mendapat tempat khusus di benak masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengenang kembali rentetan peristiwa Agresi Militer Belanda ke-II hingga mundurnya tentara Belanda dari Ibukota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, memunculkan ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah monumen yang berfungsi sebagai *tetenger*.⁵ Atas gagasan tersebut maka pada tanggal 15 Desember 1972 dibuatlah monumen tepat di titik 0 Km Jalan Jendral A. Yani, Kota Yogyakarta.

Atas prakarsa Panglima Daerah Militer VII/ Diponegoro. Bapak Majen TNI Widodo, yang didukung oleh masyarakat yang sebagian besar ikut serta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan dengan mendapat restu Bapak Presiden RI Jendral TNI Suharto yang waktu itu berpangkat Letnan Kolonel sebagai Komandan Wehrkreise III memimpin langsung Serangan Umum 1 Maret 1949 bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka dibentuklah sebuah Panitia Pembangunan Monumen “SATU MARET”. Dengan Surat Keputusan Pangdam VII/ Diponegoro Ketua Badan Pembina Ikatan Rumah Diponegoro, Nomor SKEP-121 / 12 / 1972 tanggal 15 Desember 1972. (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67).

Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 tahun 1973



Sumber: Suhartono. W. P, dkk, *Yogyakarta the Capital of the Republic of Indonesia 1946-1949*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 122.

⁵Monumental memiliki pengertian segala sesuatu peristiwa yang dianggap memiliki nilai tertentu sehingga layak untuk diabadikan dan dikenang.

Sebagai identitas kota, monumen menjadi sebuah lambang yang memberi kesan dan nilai tertentu tentang sebuah kota pada penduduknya.



Sumber: Foto milik pribadi taun 2019.

Monumen yang dibuat lima tahun setelah Suharto menjabat menjadi presiden itu merupakan karya Saptoto bersama Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), seniman yang juga membuat Monumen Pancasila Sakti. Peristiwa monumental tersebut dikenal dengan sebutan “Serangan Umum 1 Maret 1949” yang kemudian dipilih menjadi nama monumen dan diresmikan oleh Suharto pada tanggal 1 Maret 1973. Tanggal 1 Maret dipilih sebagai tanggal peresmian monumen tidak lain sebagai simbol dari peristiwa yang ingin dihadirkan kembali ke dalam monumen tersebut. Tujuannya yaitu memberikan visualisasi peristiwa kesejarahan dalam konteks waktu dan tempat, sehingga kita secara tidak langsung diajak untuk memahami hubungan sejarah dan memori (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67).

Monumen SO 1 Maret 1949 tentu dibangun karena suatu hal, artinya dibangun berdasarkan sebuah peristiwa yang dianggap penting dan harus selalu diingat oleh masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga menyimbolkan dominasi kuat dari pengaruh penguasanya, yang diwujudkan dalam monumen atas peran sekelompok orang yang diklaim sangat berjasa dalam peperangan. Pada tahapan selanjutnya, kisah berjasanya sekelompok orang ini diarahkan pada legitimasi kekuasaan karena kenyataannya orang yang berjasa telah memiliki kekuasaan dan status sosial tinggi yang harus diterima sebagai sebuah “kebenaran” (*truth*).

Hal ini juga menunjukkan sebuah kecenderungan penguasa di Indonesia yang selalu membangun monumen sekaligus mengisyaratkan peran sebuah *tetenger* begitu penting. Monumen ini pada akhirnya secara politis menjadi legitimasi penguasa terkait dengan peran, harapan, dan kejayaan.⁶ Sebuah model yang pernah diterapkan oleh pemerintah Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Orde Baru. Hanya saja bagi pemerintah Orde Lama hal itu tidak sempat dilakukan secara sistematis (Aswi Warman Adam, dalam, Bambang Purwanto & Aswi Warman Adam, 2013: 76). Sebagai contoh dapat disaksikan pada Monumen Nasional (Monas) di Jakarta sebagai simbol kejayaan masa lampau dan memperlihatkan pembangunan yang nasionalis. Kemudian setelah Orde Lama berakhir, pemerintah Orde Baru kembali membangun Monumen Pancasila, Monumen Yogya Kembali (Monjali), Monumen SO 1 Maret 1949 dan beberapa monumen lainnya. Monumen ini ditampilkan dengan tampilan dan nilai yang berbeda-beda, namun tetap menonjolkan muatan-muatan atau *framing* yang bersifat pengagungan terhadap peran Suharto dibalut dengan kejayaan militer.

Sebagai contoh di Yogyakarta, bahwa Monumen SO 1 Maret 1949 dan Monumen Monjali sama-sama berbasiskan “militerisme”. Monumen SO 1 Maret mewakili rekaman peristiwa penyerangan total pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Kota Yogyakarta dan terkenal dengan 6 jam di Yogyakarta yang ketika itu masih menjadi Ibukota Indonesia (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67-69). Sementara itu, Monjali mewakili peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai Ibukota Indonesia dari genggaman Belanda yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (Soetardono & Sri Utami, 1994: 90-92). Kedua peristiwa ini yang kemudian dianggap momen penting bagi Indonesia, karena ketika itu Yogyakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang baru berusia tiga tahun diduduki kembali oleh militer Belanda yang sering kita dengar dengan istilah Agresi Militer Belanda ke-II. Namun dengan adanya serangan yang dilakukan secara serentak pada tanggal 1

⁶Sebuah pengetahuan yang disampaikan dalam monumen tersebut telah diseleksi sebelumnya, dikonstruksi, dan selanjutnya diwacanakan melalui bentuk bangunan dan relief dibelakangnya. Melalui prosedur metode representasi yang demikian, maka hampir semua monumen kemudian tak dapat lepas dari muatan politis lantaran hadirnya dimensi “kekuasaan” di sana.

Maret tahun 1949, militer Belanda berhasil dipaksa mundur hingga tercapainya perjanjian dan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

Peristiwa ini yang kemudian tidak lepas dari *framing* untuk menonjolkan peran militer dalam revolusi kemerdekaan. Utamanya, *framing* politik memori berbalut motif militer terkait sosok Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru. Hal ini yang menunjukkan bahwa bangunan monumen maupun relief yang dibuat, merupakan medium penyampai pesan politis penguasa dalam bentuk sebuah narasi historis di dalam pesan utama monumen, atau sederhananya untuk mengendalikan tafsiran-tafsiran terhadap pesan monumen.

B. Politik Memory di Dalam Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949

Monumen SO 1 Maret 1949 yang diresmikan pada tahun 1973 oleh Presiden Suharto, menjadi salah satu media pemerintah Orde Baru untuk menyampaikan pesan-pesan subjektifnya. Hal ini dimungkinkan, karena dalam pembiayaan serta personil yang terlibat dalam pembangunannya sudah pasti tunduk pada kendali atau pedoman pemerintah (Michael Wood, 2013: 10). Ekspetasinya kemudian mengarahkan monumen ini untuk selalu mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu, terutama peristiwa yang diabadikan melalui relief di bangunan monumen ini. Berangkat dari pemaparan tersebut, suatu narasi tertentu diciptakan untuk menyampaikan sesuatu yang dimemorikan agar menjadi “kebenaran” tentang peristiwa tertentu. Dengan kata lain monumen menjadi “agen memori resmi” yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai ingatan kolektif yang “benar” dan sesuai dengan kepentingan penguasa (Budiawan, 2013: 8).

Hal ini kemudian dapat dipahami bahwa pemerintah Orde Baru benar-benar perhatian terhadap keberadaan monumen, karena memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat besar dari sejarah yang “diproduksi” ulang. Sederhananya monumen dijadikan sebagai legitimasi penguasa dalam mengingat kejadian masa lalu untuk dipahami masyarakat kontemporer. Pengetahuan yang dikontraskan untuk publik atau masyarakat kemudian tidak dapat lepas dari pengawetan ingatan yang dibentuk oleh penguasa. Pola-pola ini yang memungkinkan Monumen SO 1 Maret 1949 menjadi lembaga pemerintah yang memiliki mekanisme khusus dalam

mentransfer pengetahuan dan diyakini bersifat politis karena juga memuat berbagai ideologi, nilai-nilai, serta pesan-pesan yang mengarah pada pengetahuan yang selaras dengan penguasa (Budiawan, 2013: 2).⁷ Hal ini kemudian melahirkan sebuah hipotesis bahwa, Monumen SO 1 Maret 1949 tidak dapat dilepaskan dari media ideologisasi dan representasi kepentingan politik pemerintah Orde Baru.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa Monumen SO 1 Maret 1949 memuat ideologi militerisme dan menonjolkan sosok Suharto yang tergambar dalam setiap objek relief. Kesan yang muncul militer lah satu-satunya yang mampu membawa negara dalam kondisi baik, sehingga pemahaman ini dilihat sebagai contoh kesuksesan strategi militer yang mana jika dilaksanakan secara konsisten dapat mempercepat kemenangan melawan Belanda (Michael Wood, 2013: 164-165).⁸ Padahal jika kita boleh objektif, peran masyarakat sipil dan juga peran diplomasi selama masa kemerdekaan juga sangat penting. Ada pemaknaan secara tidak langsung peran perjuangan yang dilakukan secara diplomasi terkesan kurang berarti dibanding perjuangan yang dilakukan melalui kontak fisik dan senjata. Narasi ini secara terus menerus diawetkan di dalam ingatan publik atau masyarakat, sehingga di benak mereka seolah-olah sosok pahlawan adalah sosok yang berjuang melalui perjuangan fisik dan senjata. Pemaknaan ini kemudian dipresentasikan oleh pihak monumen dengan cara legitimasi, narativisasi, diversifikasi, unifikasi, disimulasi, dan fragmentasi yang mengarah pada politik memory. Mekanisme ini dikonstruksikan oleh pihak perancang Monumen SO 1 Maret 1949 ke dalam kesadaran publik sebagai salah satu upaya pemerintah Orde Baru dalam *framing* sejarah untuk kepentingan masa kini.

Dengan demikian, tujuan politis di dalam *public space* berupa monumen tidak dapat dihindarkan, karena jelas berfungsi sebagai pengawet sosok militer dalam suatu peristiwa, serta tampil sebagai agen yang melegitimasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Suharto yang terus dimunculkan. Kekuasaan dalam hal ini

⁷Konstruksi dan reproduksi sejarah sarat kepentingan politis dan ideologi rezim yang berkuasa, tujuannya tidak lain untuk mendukung dan melegitimasi kekuasaannya.

⁸Dalam kerangka Orde Baru, sepirit militerisme terlihat dari banyaknya infiltrasi militer di ranah sosial masyarakat yang telah menjadi basis legitimasi aktor militer didalam menjalankan segala aktivitasnya.

adalah daya yang dimiliki negara untuk mengatur “historiografi” agar mengarahkan masyarakat untuk mendukung kekuasaan militeristik dan kelanggengan kekuasaan Orde Baru. Oleh sebab itu, dari pola-pola ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *public space* berupa monumen atau *tetenger* telah menjadi salah satu media dan representasi kepentingan politik yang kemudian menjadi monopoli, artinya kebenaran-kebenaran atas informasi sepenuhnya diklaim oleh penguasa.

Hegemoni atau dominasi penguasa benar-benar mengarah pada “rekayasa” dan konstruksi sebuah peristiwa sejarah untuk kepentingan mengokohkan kekuasaan. Hal tersebut juga telah membuktikan bahwa dalam kontestasi politik sering kali dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui bangunan monumen. Pada titik ini, kemudian dapat dipahami bahwa sejarah dan politik memori dikendalikan oleh penguasa untuk tujuan yang hendak direngkuh, tentunya dapat sesuai dengan keinginannya pada narasi yang disampaikan.

C. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebagai Legitimasi Kekuasaan Suharto

Monumen SO 1 Maret 1949 dianggap sangat penting, karena berhasil menghadirkan sebuah peristiwa di Yogyakarta yang berkaitan erat dengan identitas kota bagaimana keterlibatan dalam revolusi kemerdekaan. Sebagai identitas kota, monumen menjadi sebuah lambang yang memberi kesan dan nilai tertentu tentang sebuah kota pada penduduknya untuk merepresentasikan secara nyata bahwa Yogyakarta sebagai kota perjuangan (R. Eddy Soekmono, 2009: 9-10. Lihat juga, P. Suryo Haryono, 1987: 69). Dengan demikian pola-pola yang dirancang pihak monumen diarahkan untuk menggugah kesadaran dan menciptakan *common memories* melalui tampilan berupa kode simbolik (*symbolic code*), tanda ikon bersama (*icon signs together*), serta pencitraan (*imaging*). Semua tampilan di atas akan menghasilkan memori masa lampau perjuangan bangsanya. Kemudian, yang tak kalah penting mengerucutkan pemahaman publik atau masyarakat pada peran sentral militer dan tokoh sentral, yaitu Suharto. Hal ini sebagai langkah membangun pola pikir (*mindset*) yang diarahkan pada penciptaan nilai-nilai yang harus diikuti

masyarakat, sebagaimana telah dicontohkan selama perjuangan revolusi di Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut pengetahuan dalam suatu masyarakat yang direpresentasikan dalam monumen, tak bisa lepas dari memori yang diawetkan oleh pihak penguasa dan pada akhirnya bersifat politis karena tersimpan kepentingan tertentu. Sederhananya monumen dijadikan sebagai legitimasi Suharto dalam mengingat kejadian masa lalu untuk dipahami publik atau masyarakat masa kini (Faye Sayer, 2017: 3).⁹

Hal ini menciptakan sebuah pemaknaan, bisa jadi Suharto ketika itu merasa sudah saatnya mendapat tempat sebagai pahlawan utama dalam satu monumen historis bangsa Indonesia. Dengan pencapaian yang sudah diraihinya, termuat dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka dari Jilid 1 - 4* ia merasa belum puas.¹⁰ Bahkan Suharto merasa belum cukup untuk menempatkan dirinya sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Sukarno yang menjadikan dirinya sebagai tokoh penting dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya dimana kini juga masih menjadi misteri nasional Akan tetapi boleh jadi Suharto juga masih merasa tidak cukup dengan label Bapak Pembangunan Indonesia, yang ia kreasi sendiri melalui pembangunan ekonomi dengan penyusunan skala prioritas melalui proyek nasional yang kita kenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Oleh karena hal-hal tersebut, Monumen SO 1 Maret 1949 selain sebagai pengingat ratusan pejuang yang tewas dalam memperjuangkan kemerdekaan, secara implisit juga menjadi bagian dari pengkultusan atas dedikasi Suharto pada negerinya.

Monumen SO 1 Maret 1949 di sisi lain juga mengupayakan adanya idiologisasi, yaitu dengan cara berulang-ulang memunculkan tokoh yang sakti dan memiliki wangsit, untuk mengambil tindakan-tindakan militer serta menyetabilkan negara yang hampir saja mengalami kehancuran akibat serangan Belanda. Hal ini

⁹Pemahaman tersebut, berkaitan dengan sejarah publik yang merupakan bagian hakiki dari sejarah masa kini. Sejarah publik berupaya memperluas pemahaman kita akan masa lalu dan hubungannya dengan masa kini.

¹⁰Lihat buku yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berjudul *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid I-4*.

digambarkan dalam relief monumen bahwa kondisi Yogyakarta sedang kacau, rakyat panik, dan pemerintah sipil ditawan, hingga akhirnya tentara harus keluar dari Yogyakarta. Jendral Sudirman sebagai panglima terpaksa harus bergerilya dari satu daerah ke daerah lainnya dengan kondisi yang sedang sakit yang dialaminya. Dalam keadaan yang tidak aman ini muncullah tokoh yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel Suharto sebagai seseorang yang cekatan dan dapat mengatasi situasi. Lalu dengan kejeniusannya, mencetuskan ide serangan besar-besaran terhadap kota Yogyakarta sebagai *counter opinion* agar membuka mata dunia Internasional dan dewan keamanan PBB bahwa sesungguhnya negara Indonesia dengan TNI masih ada (Ilmiawati Safitri, Sri Margana, dkk, 2017: 331-332).

Pemaknaan ini diarahkan untuk mengingat sosok Suharto yang berperan besar dalam peristiwa SO 1 Maret 1949, sehingga ketika masyarakat Indonesia memperingati peristiwa tersebut setiap tahunnya sudah pasti mengingat Suharto sebagai kreator serangan ini. Dengan anggapan seperti ini, maka muncul istilah bagi masyarakat yang menghargai sejarah pahlawan-pahlawan nasional sebagai warga negara yang “baik”. Sehubungan dengan hal tersebut pesan politik yang menyatu dengan monumen juga selalu ditampilkan untuk masyarakat, sehingga nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk selalu mengingatnya.

Pala-pola ini yang kemudian menjadi legitimasi kepemimpinan dan kelayakan Suharto untuk terus memimpin bangsa dengan konsep Jawa. Dalam konsep kepemimpinan Jawa, untuk mendapatkan legitimasi raja menjadi objek kehormatan dimana ia memiliki prioritas untuk mendapatkan kekuatan supranatural (*kasekten*) yang membenarkan mereka menjalankan kekuasaan. Dibimbing oleh ilham kekuasaan supranatural wahyu (*wangsit*) sehingga tidak mungkin bertindak salah. Raja dianggap sebagai perwujudan kerajaan atau nengara, oleh sebab itu jika bertindak dan berbicara menentang negara berarti memberontak (*mbalelo*) dan benar-benar pantas dihukum. Pemahaman “otoriter” seperti ini yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjalankan kekuasaannya.

Namun tidak dapat dipungkiri lamanya Rezim Soeharto dalam menduduki puncak kekuasaan di Indonesia juga diwarnai oleh berbagai kontroversi di dalamnya, yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi politik dalam menjaga

status yang dimilikinya. Kontroversi seputar kekuasaan ini muncul pasca runtuhnya Orde Baru, meskipun hal tersebut tidak terlihat secara seketika. Dengan demikian terbukalah ruang untuk mempertentangkan konstruksi sejarah versi Orde Baru yang mengarah pada “siapa yang menguasai sejarah, menguasai masa depan, yang menguasai masa kini, menguasai sejarah” (Sunarto dan Dini Yunarti, 2010: 233). Nampaknya inilah yang dilakukan melalui monumen bernama Monumen SO 1 Maret 1949 yang lahir sebagai sebuah alat kekuasaan dan menjadi bagian penting terciptanya legitimasi di mata masyarakat.

Tokoh Suharto sebagai pemeran utama dalam cerita yang dinarasikan melalui monumen ternyata menuai banyak kritik. Salah satunya yaitu dari seorang Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bernama Aswi Warman Adam yang dari beberapa bukunya seperti *Pelursan Sejarah, Melawan Lupa Menepis Stikma*, dan *Membongkar Manipulasi Sejarah* mengungkapkan dari sudut pandang yang berbeda (Aswi Warman Adam, 2015: 7-10). Kritikan tersebut seperti contohnya kasus dominasi Soeharto yang mendiskreditkan peran Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penggagas rencana Serangan Umum 1 Maret 1949. Padahal perlu dipertanyakan, misalnya apakah Soeharto memiliki pengetahuan mengenai dunia luar dan kecenderungan politik untuk memahami konsekuensi global dari aksi yang direncanakannya. Sebaliknya Sultan Hamengku Buwono IX lah yang memiliki empat fungsi penting, yaitu sebagai Gubernur, Raja Kesultanan Yogyakarta, Menteri Pertahanan, dan diplomat yang dipercaya melakukan perundingan. Sangat tidak mungkin jika Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak memiliki peran penting dalam peristiwa besar di Kota Yogyakarta ((Ilmiawati Safitri, Sri Margana, dkk, 2017: 331-332).

KESIMPULAN

Dalam konteks ini monumen merupakan *tetenger* dari sebuah peristiwa untuk diceritakan kepada publik atau masyarakat yang berlaku sebagai penerimanya. Adapun tujuan utama dibangunnya Monumen SO 1 Maret 1949, yaitu sebagai ungkapan penghargaan kepada para pahlawan. Lebih dari itu monumen juga diharapkan sebagai pengingat bagi generasi muda, agar tidak lupa

dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dan semangat yang diteladani, sehingga nilai-nilai perjuangan para pendahulu tetap terjaga.

Dari penjelasan singkat di atas dapat ditarik benang merah, bahwa sebagian besar monumen sejarah perjuangan di Yogyakarta dan juga banyak di kota-kota lain di Indonesia dekat dengan persoalan memori tentang sejarah nasional untuk menjadi apa yang diharapkan untuk diingat. Hal ini termanifestasi dalam simbol-simbol material yang mengemas kisah-kisah perang kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang diasosiasikan dengan militer. Simbol material tersebut dalam konteks ini adalah monumen yang bertujuan untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai pesan simbolis. Pesan yang diharapkan dapat dicerna oleh publik atau masyarakat dan kemudian ada harapan akan tercapai sebuah kesadaran kolektif untuk melanggengkan “kekuasaan”.

Kenyataan ini membuat *public space* (Monumen SO 1 Maret 1949) menjadi semacam arena kontestasi memori, karena memiliki narasi yang tidak terlepas dari penguasa. Oleh sebab itu, *public space* tidak pernah bebas dari pemaknaan oleh berbagai pihak yang memiliki kuasa dalam mengisi ruang tersebut. Itu berarti bangunan Monumen SO 1 Maret 1949 menjadi pendukung dalam proses pewacanaan yang sengaja dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan subyektifitas. Fakta yang ada juga menunjukkan bahwa ekspresi atau pesan yang disampaikan sebagai salah satu cara untuk terus mempertahankan legitimasi dan melestarikan kekuasaan Orde Baru.

Dengan demikian dapat diketahui, bawa konstruksi sejarah melalui sebuah monumen atau *tetenger* yang mengandung memori yang diendapkan adalah sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. Lebih dari itu, monumen telah dijadikan perantara untuk menyatukan persepsi atau konstruksi makna atas sebuah peristiwa sejarah untuk kepentingan masa kini yang mengarah pada monopoli penguasa. Hal ini yang kemudian makna *public space* khususnya monumen ikut berperan dalam mengontrol dan pembentukan sebuah persepsi dan tindakan sosial. Tujuannya yaitu sebagai bentuk legitimasi berupa pengakuan masyarakat akan kekuasaan Suharto yang dibalut dengan kejayaan militer.

Namun tidak dapat dipungkiri pada perkembangannya berbanding terbalik ketika penguasa dalam hal ini Orde Baru runtuh, yang membuat monumen ini menjadi kontroversial. Narasi masa lalu (sejarah) yang beragam kemudian muncul dan saling bersaing. Bahkan memori semacam ini sering berbenturan dan mengorbankan narasi sejarah masa lalu yang hidup di masyarakat. Mungkin kedengaran bising, namun tetap lebih baik buat keadaan publik daripada masa lalu menjadi terlupakan. Bahkan tidak mengherankan jika saat ini muncul kalimat pertanyaan berlatar belakang Bahasa Jawa “*Pie kabare? Enak jamanku toh?*” yang begitu persuasif di benak masyarakat Indonesia. Sekilas kalimat tersebut mengajak untuk mengingat masa lalu dan menyiratkan sebuah perbandingan antara keadaan pada masa Orde Baru dengan kini ketika reformasi menjadi keyakinan bangsa Indonesia. Pada intinya pesan tersebut merupakan simbol soal kondisi yang nyaman dan aman di masa lalu. Inilah wujud “keberhasilan” pengendapan politik memori dalam bentuk rekonstruksi *mindset* yang pernah diupayakan oleh penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antakusumah, *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Aswi Warman Adam, *Melawan Lupa, Menepis Stigma*, Yogyakarta: Kompas, 2015.
- Aswi Warman Adam, “Pelurusan Sejarah dan Historiografi Alternatif”, dalam, Bambang Purwanto & Aswi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Bambang Purwanto, “Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otentik”, dalam, Bambang Purwanto & Aswi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Budiawan, *Sejarah Memori Titik Simpang dan Titik Temu*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Eddy Soekmono, R., *Yogyakarta Ibukota Perjuangan*, Yogyakarta: Narasi, 2009.
- McGregor, Katherine E, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Syarikat, 2008.

- Himawan Soetanto, *Yogyakarta: Jendral Spoor (Operasi Kraai) Versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No.1)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Ilmiawati Safitri, "Film Sebagai Alat Propaganda Rezim Penguasa", dalam, Sri Margana, dkk, *Menemukan Historiografi Indonesia Jilid I*, Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997.
- Nasution, A.H., *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia: Perang Gerilya Semesta II Jilid 10*, Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa, 1977.
- Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwi fungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan, 1948.
- Sayer, Faye, *Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis*, Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Soetardono & Sri Utami, *Sejarah Monumen Yogya Kembali*, Yogyakarta: Badan Pengelola Museum Monumen Yogya Kembali, 1994.
- Sunarto dan Dini Yunarti, *Konflik Dibalik Proklamasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Suryo Haryono, P., dkk, *Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, 1987.
- Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*, Yogyakarta: Media Persindo, 2000.
- Wood, Michael, *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*, trj. Astrid Reza dan Abmi Handayani, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Lampiran

Lampiran I

Kordinator Konservator Museum Benteng Verdeburg Yogyakarta, Darsono menunjukkan relief yang dicoret-coret oleh oknum tak bertanggungjawab di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Selasa (19/2/2019)



Sumber: Christi Mahatama, Tribun.com
<https://jogja.tribunnews.com/2019/02/20/polisi-buru-pelaku-vandal-monumen-so-1-maret>.